

ANALISIS KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DAN TINGKAT KORUPSI DIANALISIS DARI OPINI AUDITOR

Sucahyo Heriningsih
UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstract

This study aims to analyze the performance of the organizers of the local government (LPPD) and the level of corruption in the analysis of the auditor's opinion, samples of cities and counties that have a corruption perception index and scores of local government performance organizers. Hypothesis testing using independent sample test from the test results indicate that there is no difference between performance of the organizers of the local government Local Government Finance Report (LKPD) received an unqualified opinion with an unqualified opinion aside. Statistically, the results of the second hypothesis indicates that there is no difference in the level of corruption among districts and cities that have an unqualified opinion and who do not have an unqualified opinion.

Keywords: *performance of local government organizers, the level of corruption, the audit opinion*

1. PENDAHULUAN

Diberlakukannya UU No. 25 tahun 1999 yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang di revisi dengan UU No.32 tahun 2004 lebih menegaskan kewenangan Pemda dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah membawa angin segar bagi daerah karena bisa mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga membawa peluang bagi kepala daerah (pemerintah daerah) untuk mengatur semua sektor secara otonom. Untuk menciptakan good governance maka perlu terlaksana system akuntabilitas di pemeritahan, sehingga dapat dilihat hasil dari pelaksanaan program kerja pemerintah dapat di evaluasi apakah telah efektif, ekonomi, dan efisien. Dari prespektif akuntansi, system akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik menjadi sangat penting, karena sebagai alat pengukur kinerja dan menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnnya. Sehingga bila dikaitkan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka sangat penting untuk adanya evaluasi terhadap pelaporan kinerjanya,

yakni yang berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

LPPD merupakan laporan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggungjawab dan karakteristik dari masing-masing Pemerintah daerah masing-masing, yang diwajibkan untuk melaporkan kepada pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri No.73 tahun2009, tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka LPPD lebih menekankan pada evaluasi kinerja dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), Nilai indeks komposit kinerja (IKK) peyelenggaran pemerintah daerah merupakan total penjumlahan hasil yang meliputi indeks capaian kinerja dengan tingkat indeks capaian kesesuaian materi. Hasil EKPPD tahunan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/ penggabungan daerah otonom.

EKPPD merupakan suatu sistem yang pengukuran dengan menggunakan IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan mandiri oleh pemerintah daerah dengan yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EPPD (Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Sehingga IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. (heriningsih, 2014)

Selain LPPD yang berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah, maka sebetulnya terdapat laporan kinerja yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan. LKPD merupakan laporan keuangan pemerintah daerah, yang merupakan laporan eksternal dari pemerintah yang tidak akan terlepas dari pengawasan para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit BPK RI dengan opini auditnya harapannya tercipta kondisi yang kondusif dan agar mudah teridentifikasi adanya kecurangan. Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang berasal dari hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahun secara rutin di audit. Laporan LKPD maupun LPPD keduanya merupakan laporan kinerja pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat.

Seringkali diasumsikan hasil dari audit BPK RI menjadi hal yang utama dalam pengukuran kinerja, namun hal ini mendapat sorotan dari ketua KPK Abraham samad (2013) yang menyatakan bahwa opini wajar dengan pengecualian (WTP) bukan jaminan bagi suatu daerah terbebas dari adanya bahaya laten korupsi. Dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah ternyata banyak melibatkan kepala daerah, hal ini kemungkinan terjadi karena adanya pergeseran kekuasaan pusat di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya diberikan kepada daerah agar pemerintah daerah meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance* (Mardiasmo, 2009), namun dalam banyak

kasus justru korupsi saat ini banyak terjadi di pemerintah daerah.

Berikut ini beberapa contoh kepala yang daerah yang pernah dan akan berhadapan dengan pengadilan: Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara, terpidana kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Langkat tahun 2000-2007, Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu, terpidana kasus korupsi pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu tahun 2006-2007. Thaib Armaiyn, Gubernur Maluku Utara, tersangka kasus korupsi Dana Tak Terduga tahun 2004 dan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2007. Mochtar Muhammad, Wali Kota Bekasi, terpidana kasus suap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. Sunaryo, Wakil Wali Kota Cirebon, terpidana kasus penyelewengan dana belanja barang dan jasa senilai Rp 4,9 miliar dalam APBD Kota Cirebon 2004. Eep Hidayat, Bupati Subang, terpidana kasus korupsi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan senilai Rp 14 miliar tahun 2005-2008. Satono, Bupati Lampung Timur, terpidana kasus korupsi penggelapan dana rakyat dalam APBD sebesar Rp119 miliar dan menerima suap Rp 10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat, Tripanca Setiadana, pada 2005. Fauzi Siin, Bupati Kerinci, terpidana kasus suap dana APBN 2008. John Manuel Manoppo, Wali Kota Salatiga, tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga. (Tempo online, Sabtu, 09 Februari 2013 | 05:51 WIB) dalam (Heriningsih, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh penulis tahun 2013 dan 2014 yang menguji pengaruh opini audit, kinerja keuangan pemerintah daerah, terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah menunjukkan secara statistic membuktikan bahwa variabel opini dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pulau Jawa. (Heriningsih, 2013). Serta dari penelitian Susilo dan Shiddig (2013) yang menguji pengaruh karakteristik pemerintah (ukuran daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, kekayaan daerah, belanja

modal) dengan temuan audit (temuan audit dibandingkan dengan total anggaran) Pemda (LPPD), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan variabel belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Heriningsih (2014) juga telah melakukan penelitian dengan menguji pengaruh akuntabilitas pemerintah daerah yang diukur (opini audit, tingkat Kelemahan SPI, tingkat ketaatan terhadap perundang-undangan) dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (skor IKK dari LPPD) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian menguji dan menganalisis secara empiris dua hasil laporan kinerja pemerintah daerah (LPPD) dan tingkat korupsi bila dibandingkan dengan opini audit. Logika penalaran yang dikembangkan penulis adalah bila laporan LPPD nya menunjukkan angka yg tinggi maka seharusnya opini audit BPK nya bagus, demikian juga sebaliknya. Dan apabila dikaitkan dengan tingkat korupsi maka dengan opini WTP seharusnya tingkat korupsinya jelek dan jika opini auditnya selain WTP seharusnya masih ada kemungkinan terjadi korupsi atau tingkat korupsinya lebih rendah/ sedikit. Berdasarkan dari latar belakang dan beberapa hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini akan menguji secara empiris :

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja penyelenggara pemerintah antara LKPD yang memiliki opini audit WTP dengan LKPD yang memiliki opini selain WTP?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat korupsi antara LKPD yang memiliki opini

audit WTP dengan LKPD yang memiliki opini selain WTP ?

2. KAJIAN LITERATUR

Opini Audit BPK RI

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga penilaian dari hasil audit yang terdapat dalam LKPD yang telah diaudit, antara lain berupa 1). opini audit atas laporan keuangan, 2). Kelemahan SPI, dan 3) Ketaatan pada perundang-undangan (heriningsih, 2013). Opini auditor menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan kinerja suatu entitas demikian juga dengan penelitian ini sehingga dengan menggunkan penalaran bahwa jika Pemerintah daerah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) maka harapannya akan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dan pastinya korupsi tidak dapat terjadi. Sedangkan jika terdapat tingkat kelemahan pada Sistem pengendalian internal maka tentu terdapat tambahan masukan untuk memperbaiki pengendalian agar lebih efektif di tahun berikutnya. Yang ke tiga ketaatan pada perundang-undangan dapat dikatakan bahwa semakin banyak ditemukan ketidaktaatan maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi.

Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri setiap tahun sekali. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EDDP) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah daerah yang baru dibentuk. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah daerah

(EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan oleh Tim Nasional dan Daerah yang membantu presiden dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional (Permendagri No 73 tahun 2009).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa EKPPD merupakan evaluasi ditingkat internal pemerintah, dimana jika indeks IKK nya tinggi maka menunjukkan kinerja penyelenggara pemerintah Daerah (LPPD) berjalan efektif dan efisien, yang bila dikaitkan dengan tingkat korupsi maka jika hasil indeks IKK nya bagus maka Tingkat korupsi akan rendah. Evaluasi dari LPPD berupa skor, peringkat dan status kinerja.

Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terjadi karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi suatu Negara maupun suatu entitas memang akan sangat sulit mengungkap adanya bahaya laten korupsi. Sehingga peran serta masyarakatlah yang diperlukan untuk dapat mengungkap dan melaporkan adanya kasus korupsi di suatu

daerah. Tingkat korupsi yang terjadi di suatu daerah tentunya sangat sulit untuk diidentifikasi. Tentusaja kebanyakan korupsi yang terjadi saat ini karena sifat dari korupsi itu sendiri yang merupakan suatu tindakan yang tersembunyi yang memang disengaja oleh pelakunya. Dalam penelitian ini tingkat korupsi yang dipakai dengan memodifikasi angka indeks persepsi (IPK) korupsi tahun 2010 yang diterbitkan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia. Skor IPK antara angka 1 dan 10, dimana 1 (angka minimal atau korupsi didaerah banyak sekali), dan 10 menunjukkan (angka maksimal atau korupsi didaerah sedikit yang terjadi). Berdasarkan angka indeks tersebut maka jika $IPK = 1$ maka diasumsikan (Tingkat korupsi 9), demikian juga untuk $IPK = 10$ maka (tingkat korupsi 1). (heriningsih, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Indonesia dan perpustakaan data BPK, sedangkan tingkat korupsi di pemerintah daerah diambil dari situs [Http: www. Ipkindonesia.org](http://www.ipkindonesia.org). *Purposive sampling* sebagai metode pemilihan sampelnya, berikut ini tabel 1 pemilihan sampel.

Tabel 1. Pemilihan sampel

Populasi: Kota dan kabupaten yang memiliki indeks Kinerja Kunci (IKK) th 2010 dari hasil evaluasi kinerja LPPD	432 kabupaten dan kota
Kota dan kabupaten yang memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) th 2010	36 kabupaten dan kota
Jumlah sampel yang di observasi	36 kabupaten dan kota

Variabel Penelitian

Opini Audit

Opini Audit merupakan variabel Independen yang diukur menggunakan variabel dummy. Laporan audit Independen merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria Standar akuntansi Pemerintah. Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri dari empat opini yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*), Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, Kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*) diberi nilai *dummy* 1 dan kategori *non unqualified* yang terdiri dari Wajar dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*), Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*) dan Tidak

Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*) diberi nilai *dummy* 0 (heriningsih, 2013)

Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kabupaten dan kota, pengukurannya dengan menggunakan skor IKK yang merupakan hasil dari laporan evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD 2010. Peneliti ini menggunakan hasil EKPPD tahun 2010, karena dengan menggunakan data tahun terkini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi saat ini tentang skor IKK yang berkisar nilai 0 (kinerja minimal) - 4 (kinerja maksimal) (Susila dan Shiddiq, 2013) dalam (Heriningsih, 2014). Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penilaian *portfolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2010 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pemeringkatan kinerja Pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri. Skor penilaian dan peringkat dapat diuraikan sebagai berikut: skor 4-3 dengan peringkat sangat tinggi; skor 2 dengan peringkat tinggi; dan 1 dengan peringkat sedang.

Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Tingkat korupsi yang dipakai dalam penelitian ini adalah memodifikasi angka indeks persepsi korupsi yang di terbitkan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia tahun 2010. Skor nilai indeks persepsi korupsi (IPK) memiliki range antara 1 sampai 10.

1= angka indek minimal berarti tingkat korupsi daerah banyak terjadi

10 = angka indek maksimal yang berarti tingkat korupsi di daerah sedikit yang terjadi

Berdasarkan angka indeks tersebut maka dapat di asumsikan bahwa jika IPK=1 dapat diasumsikan tingkat korupsi (TK=10), atau sebaliknya jika IPK=10 maka dapat diasumsikan tingkat korupsinya (TK=1), sehingga setelah mendapatkan untuk mendapatkan angka tingkat korupsi dapat menggunakan rumus: $TK = 1 - IPK$ (heriningsih, 2014)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Sampel yang di observasi dalam penelitian ini berjumlah 36 kota dan kabupaten, yang telah melaporkan a). LKPD (laporan Keuangan Pemerintah Daerah) dan memperoleh opini audit, b). Kabupaten dan kota yang melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan c) telah memiliki indeks persepsi korupsi. Berikut ini hasil analisis deskriptif variabel penelitian disajikan tabel 2 dan tabel 3 berikut ini:

Tabel 2. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat korupsi	36	7.65	10.16	9.8329	.38263
Skor LPPD	36	1.31	3.24	2.4346	.46711
Opini Audit	36	.00	1.00	.3333	.47809
Valid N (listwise)	36				

Tabel 3. Group Statistics

	opini	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tingkat korupsi	0	24	9.8010	.46299	.09451
	1	12	9.8969	.10459	.03019
Skor LPPD	0	24	2.3809	.49974	.10201
	1	12	2.5422	.39131	.11296

Berdasarkan tabel 2, variabel opini audit nilai rata-rata menunjukkan 0,3333 dan untuk variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan melihat dari skor LPPD nilai rata-rata mencapai 2,4346 yang berarti berdasarkan jumlah sampel kabupaten dan kota untuk skor LPPD tahun 2010 memperoleh sudah banyak yang memperoleh predikat kinerja tinggi atau bisa dikatakan mempunyai kinerja yang baik sudah karena di atas 2. Sedangkan untuk tingkat korupsi yang merupakan modifikasi dari peringkat indeks persepsi korupsi menunjukkan nilai rata-rata 9,8329, berarti bahwa tingkat korupsi yang terjadi masih tinggi berdasarkan survey yang di lakukan oleh lembaga Transparansi Indonesia.

Apabila di lihat dari tabel 3 maka dapat di jelaskan bahwa berdasarkan sampel yang diambil menunjukkan bahwa dari 36 sampel, yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ada 12, dan yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian sebesar 24. Berdasarkan tabel 3, variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan

menggunakan skor LPPD untuk sampel yang memperoleh opini WTP nilai rata-rata 2,5422 sedangkan untuk yang tidak memperoleh opini selain WTP nilai rata-rata nya 2,3809, hal ini dapat di katakana bahwa rata-rata nilai kinerja LPPD hampir sama diantara keduanya yaitu di atas 2, atau memiliki kategori tinggi/ memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

Sedangkan tingkat korupsi juga katagorikan pada 2 kategori yaitu untuk sampel yang LKPD memiliki opini WTP mencapai angka rata-rata 9,8969 dan untuk sampel yang LKPD nya tidak mendapatkan WTP nilai rata-rata nya mencapai 9,8010 dengan demikaian nilai rata-rata dari dua kategori sampel hampir sama atau dapat di katanya keduanya memiliki tingkat korupsi di daerah masih tinggi berdasarkan hasil survey.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dianalisis dengan menggunakan *Independent Samples Test* yang terdapat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Tingkat korupsi	Equal variances assumed	.766	.388	-.704	34	.486	-.09595	.13627	-.37287	.18098
	Equal variances not assumed			-.967	27.339	.342	-.09595	.09921	-.29940	.10750
Skor lppd	Equal variances assumed	1.044	.314	-.976	34	.336	-.16136	.16526	-.49720	.17448
	Equal variances not assumed			-1.060	27.507	.298	-.16136	.15220	-.47339	.15066

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dianalisis Dengan Opini Audit (Hipotesis 1)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 0,314, karena di atas 0,05 maka H1 di tolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan secara statistic tidak terdapat perbedaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota yang LKPD nya memperoleh opini WTP, dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kota dan kabupaten yang LKPD memperoleh opini audit selain WTP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebetulnya kinerja yang dilaporkan dalam laporan LPPD kebanyakan sudah menunjukkan peringkat dan status kinerja yang sudah memuaskan (rata-rata berperingkat tinggi dengan nilai di atas 2) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat juga dijelaskan bahwa walaupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan opini audit selain WTP dari BPK RI, namun laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah (LPPD) mendapatkan peringkat yang tinggi atau bagus kinerja pemerintah daerahnya.

Tingkat Korupsi Dianalisis Dengan Opini Audit (Hipotesis 2)

Hasil pengujian untuk variabel Tingkat korupsi menunjukkan angka probabilitas 0,388 yang berarti di atas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa secara statistic membuktikan tidak terdapat perbedaan tingkat korupsi antara kota dan kabupaten yang LKPD memperoleh opini audit WTP, dengan tingkat korupsi di kota dan kabupaten yang LKPD nya memperoleh opini audit selain WTP. Hal ini dapat dikatakan bahwa walaupun opini audit atas LKPD memperoleh WTP dari BPK RI, namun masih sangat memungkinkan adanya bahaya korupsi yang bisa terjadi. Seperti yang di katakan oleh ketua KPK Abraham Samad (2013) bahwa banyak instansi yang bersembunyi di balik kedok WTP, artinya yang mengantongi WTP sering menjadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan dari aparat penegak hukum. Beberapa contoh daerah yang memperoleh opini WTP tetapi

terindikasi korupsi misalnya di propinsi Bengkulu terkait hilangnya milliaran asset. Demikian juga dengan bupati Tegal terkait kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi.

Pembahasan

Opini audit dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah, terutama bila mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), hal ini dikarenakan banyak pihak yang mengartikan bahwa jika LKPD memperoleh WTP indikasinya sudah bersih dan sudah tidak ada lagi korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Akan tetapi dari beberapa kasus korupsi yang terjadi banyak kepala daerah terjerat korupsi, di mana sering juga di dapati bahwa LKPD nya bagus dengan opini WTP. Untuk itulah banyak dari pimpinan KPK maupun BPK selalu menyatakan dalam banyak forum bahwa WTP bukan jaminan pemerintahan akan bersih dari KKN.

Berdasarkan fenomena akan banyaknya kasus korupsi serta opini audit WTP yang sering dikatakan pasti LKPD nya bersih dari KKN, serta dari hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa ternyata tingkat korupsi untuk LKPD kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP, maupun yang LKPD yang memperoleh opini audit selain WTP adalah tidak berbeda. Walaun dengan pengujian yang berbeda penelitian ini mendukung hasil penelitian Heriningsih (2014), Mustikarini dan Fitriasi (2012), di mana tingkat korupsi tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK RI, meskipun secara teori seharusnya terdapat perbedaan tingkat korupsi untuk LKPD dengan opini yang WTP dengan yang tidak WTP.

Terdapat banyak Laporan kinerja yang harus disusun oleh pemerintah (LAKIP, LPPD, LKPJ, dll) dan dalam penelitian ini pengukuran kinerja yang dipakai adalah Laporan Penyelengarann Pemerintah Daerah (LDDP). Hasil penilaian evaluasi LPPD dinilai dengan menggunakan skor dan peringkat yang di keluarkan oleh Kemendagri. Berdasarkan pengujian hipotesis 1, bahwa tidak berbeda kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah antara

yang beropini WTP dengan yang tidak WTP. Dari hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagian sampel memiliki nilai rata-rata yang sama, sehingga setelah diuji signifikansinya juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak terdapat perbedaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) antara yang beropini WTP dengan yang tidak WTP. Penelitian terdahulu sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti, sehingga belum bisa di perbandingkan. Secara teori, kinerja yang baik dimungkinkan opini juga baik namun dalam penelitian ini secara empiris menunjukkan, kinerja LPPD mempunyai peringkat yang hampir sama rata-rata peringkatnya yaitu 2 (tinggi) sehingga perlu di kaji kembali dengan menggunakan sampel yang lebih banyak lagi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggara pemerintah daerah (skor IKK dari LPPD) secara statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP. Tingkat korupsi (Indeks persepsi Korupsi modifikasi), secara statistik juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP. Dari pengujian hipotesis ini sebenarnya mendukung apa yang di katakana oleh Abraham Samad (Ketua KPK) bahwa tingkat korupsi bisa terjadi walaupun mendapatkan opini WTP. Demikian juga untuk kinerja penyelenggara pemerintah daerah (LPPD) yang rata-rata memiliki nilai yang tinggi sehingga walaupun mendapatkan opini selain WTP tapi kinerjanya mempunyai nilai bagus/tinggi.

Keterbatasan Dan Saran

Penelitian ini menggunakan sampel yang hanya memiliki Indek Persepsi Korupsi dan yang memiliki skor IKK dari LPPD, di mana tidak semua kota dan kabupaten memiliki di Indonesia, hal ini yang mungkin

menjadi perlu untuk diteliti ulang dengan menggunakan alat pengukuran yang berbeda misal kinerja dengan menggunakan Lakip atau LKPJ untuk tingkat korupsi dengan melihat data pelanggaran hukum yg terjadi di pemerintah daerah. Penelitian sejenis sepengetahuan peneliti belum banyak sehingga belum banyak yang bisa diperbandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Tegal Ajukan Penangguhan Penahanan, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum>, diakses 1 Januari 2015
- Dollery. B. E, and Grant. B, 2011, *Economic Efficiency versus Local Democracy? A Evaluation of Structural Change and Local Democracy in Australian Local Government*, Journal of Interdisciplinary Economics.
- Department of Local Government and Planning, 2011, *Financial management (sustainability) Guideline*, Australia
- Geys. Benny, Friedrich. Heinemann, Alexander Kalb, 2007, *Value for money? Measuring German Lokal Government Efficiency. Proceedings Conference Governace research unit*, Berlin, Germany.
- Heriningsih, Sucahyo, dan Marita, 2013, *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah kabupaten dan Kota di Pulau Jawa)*, Buletin Ekonomi, Vol 11, No.1. FE UPNVY, Yogyakarta.
- Heriningsih, Sucahyo, dan Rusherlistyani, 2014, *Pengungkapan Laporan Keuangan, Kelemahan SPI, dan Ketaatan pada Perundang-undangan yang Dianalisis dari opini Auditor*, Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper Sinau 3, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur.
- Heriningsih, Sucahyo, 2014, *Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Paradigma, Vol.18, No 2. FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Jones, Rowan & Pendlebury, Mourice, 2000, *Public Sector Accounting*, 5th Ed. London: Financial Times- Prentice Hall.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., Ho, Tsai-Neng. 2010. Applying integrated EA/AHP to evaluate the economic performance of local governments in China. *European Journal of Operational Research*, 209 .
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset:Yogyakarta.
- Mustikarini dan Fitriasi, 2012, Pengaruh Karakteristik Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi. IAI, Jakarta. <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>
- Nurcholish, H. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Predikat WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/3>, di akses 1 Januari 2015
- Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- Susilo, Hafidh dan shiddig Nur Rahardjo , 2013, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.4.
Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Diponegoro. Semarang.